

**DANA PERIMBANGAN DAN PDRB PROVINSI-PROVINSI  
DI INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL  
TAHUN 2013-2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis**

**Oleh :  
WIWIT HENDIKA PERMATA SARI  
B300150112**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DANA PERIMBANGAN DAN PDRB PROVINSI-PROVINSI DI  
INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2013-2017**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**WIWIT HENDIKA PERMATA SARI**

**B300150112**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



**Muhammad Anas, S.E., M.Si.**

HALAMAN PENGESAHAN

DANA PERIMBANGAN DAN PDRB PROVINSI-PROVINSI DI  
INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2013-2017

OLEH

WIWIT HENDIKA PERMATA SARI

B 300150112

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu, 31 Juli 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muhammad Anas, S.E., M.Si.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Drs. Yuni Prihadi Utomo, S.E., M.M.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Agung Riyardi, S.E., M.Si.

(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, M.M.

NIKATP. 19570217 1986 031 011

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran atas pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Juli 2019  
Penulis



WIWIT HENDIKA PERMATA SARI  
B300150112

## **DANA PERIMBANGAN DAN PDRB PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2013-2017**

### **Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan disebabkan oleh pertumbuhan transfer DAU, DAK, dan DBH yang tidak stabil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia di era desentralisasi fiskal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan asumsi *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK, DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB. Secara parsial, variabel DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan variabel DAU tidak berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia. Implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah yaitu mengeksplorasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang mandiri.

**Kata Kunci :** DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, Data Panel, *Fixed Effect Model*

### **Abstract**

*Economic growth in Indonesia had decreased due to the unstable growth of DAU, DAK and DBH transfers. The purpose of this study was to determine the effect of DAU, DAK, and DBH transfers on GDRP of provinces in Indonesia in the fiscal decentralization era. To achieve this goal, this study uses a panel data regression model with Fixed Effect Model. The results of this study show that the DAU, DAK, and DBH simultaneously have a significant effect on GDRP. Partially, the DAK and DBH have a positive and significant impacts on GDRP, while the DAU was found to have no effect on the GDRP in Indonesia. The policy implications that can be taken by the local government are exploring the source of Regional Original Revenue (PAD) to increase economic growth so that it can become an independent region.*

**Keywords:** DAU, DAK, DBH, Economic Growth, Panel Data, Fixed Effect Model

## **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah menyebabkan perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan keuangan, yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Penerapan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada di suatu daerah sehingga dapat memacu

peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. Desentralisasi fiskal diwujudkan dalam bentuk kebijakan dana perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK, dan DBH. Oleh sebab itu, kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh langsung terhadap keuangan daerah, khususnya terhadap sumber pendapatan daerah (Saragih, 2003).

Ketika negara Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan produk yang dihasilkan. Ketika produk yang dihasilkan sedikit, maka penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan sehingga pendapatan masyarakat juga akan menurun dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menurun karena aktivitas ekonomi yang tidak lancar. Pertumbuhan transfer dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) yang tidak stabil juga dapat mengakibatkan tingkat investasi mengalami penurunan yang akan berakibat pada menurunnya tingkat produksi, sehingga ketika transfer dana perimbangan tidak stabil maka tidak dapat menunjang proses pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada dana perimbangan dari sisi penerimaan daripada sisi pengeluaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sisi penerimaan, dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai modal dalam aktivitas produksi yang dapat meningkatkan output di suatu daerah. Adanya peningkatan output dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB pada tingkat nasional dan kenaikan PDRB pada tingkat regional yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan suatu negara atau wilayah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, dana perimbangan digunakan untuk belanja daerah untuk pengadaan aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan serta fasilitas umum yang bersumber dari belanja modal.

Berdasarkan uraian dan pemikiran di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dana Perimbangan dan PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia: Analisis Data Panel Tahun 2013-2017”**.

## 2. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data panel yaitu data periode waktu 2013-2017 (*time series*) yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia (*cross section*). Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan penggabungan data *time series* dan *cross-section*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah DAU, DAK, dan DBH menurut provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$PDRB_{it}$  = Produk Domestik Regional Bruto untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi

$DAU_{it}$  = Dana Alokasi Umum untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

$DAK_{it}$  = Dana Alokasi Khusus untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

$DBH_{it}$  = Dana Bagi Hasil untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

$\varepsilon_{it}$  = Komponen *error* di waktu t untuk unit *Cross Section*

i = Menunjukkan Provinsi

t = Menunjukkan deret waktu 2013-2017

### 3.1 Estimasi Model Data Panel

Tabel 1 Hasil Regresi Data Panel *Cross Section*

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	-124,690	205,536	150,185
DAU	22,088	1,687	7,122
DAK	4,493	8,792	6,873
DBH	55,588	7,573	8,793
R <sup>2</sup>	0,614	0,997	0,519
Adj.R <sup>2</sup>	0,607	0,996	0,510
F-Statistik	87,998	1.085,833	59,592
Prob.F-Statistik	0,000	0.000	0,000

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kemenkeu, diolah

### 3.2 Uji Pemilihan Data Panel

#### 3.2.1 Uji Chow

Uji Cho adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model FEM dengan model PLS.

Tabel 2 Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	454,822	(33,133)	0,000
Cross-section Chi-Square	804,931	33	0,000

Sumber : Output data panel menggunakan Eviews 10

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui nilai Probabilitas F yaitu  $0,000 < 0,01$  dan Chi-Square yaitu  $0,000 < 0,01$  maka  $H_0$  ditolak, jadi model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

#### 3.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui model mana yang dipilih dalam analisis antara model FEM dengan model REM.

Tabel 3 Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Hausman

Effect Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section Random	43,154	3	0,000

Sumber : Output data panel menggunakan Eviews 10



Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai probabilitas *Cross-Section Random* yaitu  $0,000 < 0,01$  yang berarti  $H_0$  ditolak, jadi model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 4 Model Estimasi *Fixed Effect Model*

$\text{PDRB}_{it} = 205,536 + 1,687\text{DAU}_{it} + 8,792\text{DAK}_{it} + 7,573\text{DBH}_{it}$			
<span style="margin-right: 40px;">(0,543)</span> <span style="margin-right: 40px;">(0,000)*</span> <span>(0,000)*</span>			
$R^2 = 0,997$ $\text{DW-Stat} = 1,246$ $\text{F-Stat} = 1.085,833$ $\text{Sig. F-Stat} = 0,000$			

Keterangan :

\*Signifikansi pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\*Signifikansi pada  $\alpha = 0,05$

Angka dalam kurung adalah nilai probabilitas t-statistik

### 3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dari hasil estimasi, nilai signifikansi statistik F sebesar  $0,000 < 0,01$ ,  $H_0$  ditolak maka menunjukkan ada hubungan yang signifikan dari DAU, DAK, Dan DBH yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB.

### 3.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan daya ramal dari model statistik terpilih. Hasil estimasi menunjukkan  $R^2$  sebesar 0,997, artinya 99,7% variasi variabel PDRB dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, dan DBH. Sedangkan sisanya 0,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model.

### 3.5 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 5 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	t	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
DAU	0,610	0,542	$>0,10$	Tidak memiliki pengaruh signifikan
DAK	7,051	0,000	$\leq 0,01$	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
DBH	4,548	0,000	$\leq 0,01$	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

Berdasarkan Tabel 6 Uji Signifikansi Parsial (Uji t), variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan.

### **3.6 Interpretasi Ekonomi**

#### **3.6.1 Pengaruh DAU terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan hasil estimasi data panel secara *Cross Section* menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017. Hal tersebut bisa terjadi karena disebabkan porsi DAU yang diterima pemerintah daerah lebih banyak untuk pemenuhan belanja rutin seperti belanja pegawai belanja modal, sehingga mengakibatkan produksi melambat, dengan melambatnya produksi maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

#### **3.6.2 Pengaruh DAK terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan hasil estimasi data panel secara *Cross Section* menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017. Dari hasil estimasi tersebut menandakan bahwa pemberian pengalokasian realisasi DAK oleh pemerintah pusat yang semakin tinggi dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **3.6.3 Pengaruh DBH terhadap PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan hasil estimasi data panel secara *Cross Section* menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017. Hal tersebut membuktikan bahwa perolehan DBH oleh pemerintah daerah yang semakin tinggi dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena secara keseluruhan DBH berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan daerah. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna memacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan memacu pendapatan daerah.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada penurunan kesempatan kerja di Indonesia. kesempatan kerja mengalami penurunan dikarenakan tingkat investasi di Indonesia yang tidak stabil sehingga tingkat produksi mengalami penurunan sehingga produk yang dihasilkan sedikit. Penyebab kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan karena alokasi dana perimbangan yang tidak stabil. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pengaruh transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia.

Untuk mengetahui pengaruh transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia maka dilakukan pengujian menggunakan data panel (*Cross Section*) dan model yang terpilih dalam estimasi data panel yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia dikarenakan transfer DAU yang seharusnya digunakan untuk belanja modal akan tetapi digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai. Ketika nilai realisasi belanja modal lebih kecil daripada belanja pegawai maka akan mengakibatkan tingkat produksi melemah, dengan melemahnya tingkat produksi maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya transfer DAK dan DBH dapat meningkatkan investasi yang dapat berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat produksi, ketika tingkat produksi meningkat penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan sehingga pendapatan meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga akan eningkat.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang diwujudkan dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berupa dana perimbangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok kapital sehingga mampu menjadi pemicu meningkatnya aktivitas produksi dan

meningkatnya output. Dengan meningkatnya aktivitas produksi dan meningkatnya output maka dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

- a. Periode waktu pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih di perpanjang untuk dapat mengetahui kecenderungan dalam jangka panjang.
- b. Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi maka pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menjadi daerah yang mandiri dan secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan dari pemerintah pusat.
- c. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum (DAU) agar Pertumbuhan Ekonommi setiap periodenya dapat bertambah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut baik dengan cara mengembangkan variabel maupun analisis untuk menyempurnakan hasil penelitian.
- e. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel dependen pada sisi pengeluaran seperti belanja pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anita, dkk. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi. ISSN: 2302-0172. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- AR, Rahmah dan Basri Zein. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1. No. 1.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Jakarta.
- Dewi, Ni Wayan Nuryanti dan Made Kembar Sri Budhi. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol. 5. No.11.

- Dewi, Ni Wayan Ratna dan I Dewa Gede Dharma Suputra. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 18. No.3.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sugeng. 2013. *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012*. Modernisasi. Vol. 9. No.2.
- Hidayah, Nurul dan Hari Setiyawati. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi. Vol.18. No.01.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Visualisasi Data APBD*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (Audited)*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited)*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited)*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawati, Lily dan I Gusti Bagus Wiksuana. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud. Vo. 7. No. 5.
- Mankiw, N. Gregory. 2010. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Prihastuti, Asepma Hygi, dkk. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau*. Jurnal SOROT. Vol. 10. No. 2.
- Pujiati, Amin. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Hal. 61-70.
- Putrayuda, T. Fahrurrisa, dkk. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015*. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol. 9. No. 3.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sabilla, Kanetasya dan Wihana Kirana Jaya. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 15. No. 1.
- Santosa, Budi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Bisnis. Vol. 5. No. 2.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Uhise, Stepvani. 2013. *Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 4.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonomika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta:  
Ekonesia.